



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggai Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Januari 2022/Periodik - 2021)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA (LAN)  
**UNIT KERJA** : INSPEKTORAT

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : Riyadi
2. Jabatan : INSPEKTUR
3. NHK : 413579

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 1.530.000.000**

1. Tanah Seluas 210 m2 di KAB / KOTA SUMEDANG, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
2. Tanah Seluas 271 m2 di KAB / KOTA SUMEDANG, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/50 m2 di KAB / KOTA SUMEDANG, HASIL SENDIRI Rp. 410.000.000
4. Tanah Seluas 140 m2 di KAB / KOTA SUMEDANG, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 194 m2/194 m2 di KAB / KOTA SUMEDANG, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 407.500.000**

1. MOBIL, DFSK GLORY 580 SUV Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000
2. MOBIL, CEVROLET TROOPER JEEP Tahun 1997, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
3. MOTOR, YAMAHA R25 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
4. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
5. MOTOR, HONDA BEAT MATIC Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000



6. LAINNYA, MOULTON SEPEDA Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.  
40.000.000
7. MOTOR, HONDA VARIO MATIC Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.  
21.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 25.000.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 155.226.724

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 2.117.726.724

**III. HUTANG** Rp. 564.882.329

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.552.844.395

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.